



Efektifitas Pengelolaan Retribusi Parkir Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2011 di Kota Gorontalo

Mattoasi^a, Dharmawaty S. Makur^b

^a Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia, mattoasi@ung.ac.id

^b Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Jl. Prof. Dr. H. Mansoer Pateda Desa Pentadio Timur, Telaga Biru, Kab. Gorontalo, Gorontalo 96181, Mattosuming@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 21-07-2020

Revised 27-08-2020

Accepted 30-08-2020

Kata Kunci:

Kemandirian, efektivitas, Pendapatan Asli Daerah, retribusi parkir

Keywords:

Autonomy, effectiveness, local income, levy parking

A B S T R A K

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berdampak terhadap belanja pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus memaksimalkan pendapatan asli daerah termasuk retribusi parkir. Penelitian ini berkaitan dengan keuangan pemerintah daerah setelah Perda No.12 Tahun 2011 telah efektif diberlakukan di Pemerintah Kota Gorontalo. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas pengelolaan retribusi parkir. Data penelitian diperoleh melalui pengumpulan data dokumen melalui Badan Keuangan Kota Gorontalo serta beberapa sumber dari website Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir mengalami penurunan selama tahun 2018 walaupun kendaraan mengalami peningkatan setiap tahun di Kota Gorontalo.

A B S T R A C T

Previus studies have shown that the financial autonomy of local governments has an impact on spending with government. There for the government must maximize the management of local income including revenue from levy parking. This research is related to Perda N0.12 of 2011 has been effectively enforced in Gorontalo City Government. The objective of this research was to determine the effectiveness management of levy parking. This research is a qualitative study and using document data an was collected throught financial departement and official websites owned government as a source of information. The results show that Local generate income from the levy parking sector has decreased during 2018, even though the vehicles have increased every year expecially in Gorontalo City.

PENDAHULUAN

Sumber daya yang telah tersedia disuatu wilayah yang dibentuk oleh alam maupun kondisi sosial dan kultur masyarakat itu sendiri yang diharapkan dapat dikelola dengan baik (Hasibuan, 2006) . Pengelolaan sumber daya yang ada di dalam suatu wilayah pemerintah menurut(Hans, 2003; Djasuro; Dede dan Fathul-Muin, 2019) perlu dimaksimalkan menuju pemerintahan yang mandiri dan otonom, termasuk memaksimalkan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari retribusi parkir selain pajak(Litman, 2010; Swinney, 2019). Selain itu sumber-sumber retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah harus dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah mengikut Standar akuntansi pemerintah (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Di Indonesia retribusi parkir berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tujuannya untuk memberi kewenangan penuh kepada daerah dalam mengelola lahan parkir secara baik dan benar baik ditepi jalan umum maupun yang diluar badan jalan, agar hasilnya dapat digunakan untuk membangun daerah. Menurut (Baswedan, 2019; Cassee, 2019; Johnson, 2018; Young, Currie, & Hamer, 2014) bahwa retribusi parkir dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada akhirnya menuju kemandirian keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.

Berdasarkan beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa pendapatan dari retribusi parkir mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, termasuk retribusi parkir yang ada di wilayah Kota Gorontalo. Namun demikian dari data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo tahun 2015 dinyatakan bahwa retribusi parkir hanya mencapai 3% dari total pendapatan asli daerah (DPPKAD, 2016) walaupun potensi retribusi sangat tinggi jika diukur dari jumlah kendaraan setiap tahun mengalami peningkatan di Kota Gorontalo (Samsat Kota Gorontalo, 2019).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi objektif kepada pemerintah daerah di dalam mengelola pajak parkir seperti yang diharapkan dari berbagai hasil penelitian, serta dapat mengembangkan *Stewardship Theory* sebagai landasan dalam penelitian ini.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penelitian ini fokus kepada pendapatan asli daerah. Teori yang digunakan adalah teori agen dan prinsipal yang disebut *Stewardship Theory* diperkenalkan oleh(Donaldson, 1985).Teori dikenal dengan teori pengamanahan, karena pemerintah adalah sebagai agen yang menerima amanah dari masyarakat di dalam mengelola sumber-sumber daya dalam organisasi untuk menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).Beberapa hasil penelitian yang menggunakan *Stewardship Theory* di dalam menjawab setiap fenomena telah banyak dilakukan.Lenze (2018) menekankan bahwa PAD lebih penting dibandingkan sumber-sumber Pendapatan daerah. Tidak jauh berbeda Gunter & Smeral, (2016); Yeeles, (2015) karena pendapatan asli daerah dikelola sendiri oleh pemerintah daerah sebagai suatu simbol kinerja pemerintah. Kemandirian keuangan yang dicapai oleh pemerintah daerah akan memberi dampak yang nyata kepada masyarakat karena keperluan dana pemerintah langsung dapat dipenuhi (Stokan, 2019).

Berkaitan dengan pendapatan asli daerah juga sejalan dengan Kluge (2013) dan Olofin, Aiyegbusi, & Adebayo (2019) menyatakan bahwa berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk perbaikan terhadap sumber daya manusia dan normalisasi perdagangan di dalam meningkatkan pendapatan asli daerah menuju kemandirian keuangan yang sejati. Demikian juga (Marlissa & Blesia, 2018) menekankan bahwa setiap cara yang digunakan oleh pemerintah daerah di dalam meningkatkan pendapatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga di dalam pelaksanaannya tidak menemui kendala yang berarti.

Keberhasilan pemerintah daerah di dalam mengelola sumber daya yang ada disekitarnya dan memanfaatkan sesuai dengan keperluan masyarakat (*principal*), dapat memberi dampak terhadap perkembangan ekonomi masyarakat sehingga ketertinggalan yang selama ini terjadi dapat bergeser ke arah yang lebih baik. Shi, Luo, Jin, Cheng, & Li, (2019) dalam kajiannya yang dilakukan di China menemukan bahwa ketertinggalan suatu daerah akan berpengaruh terhadap pemerintah pusat, sehingga harus dimajukan secara bersama-sama.

Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain (Beatty, 2018) sehingga penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dimaksimalkan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Lewis (2019) juga memandang bahwa pendapatan asli daerah menjadi sangat penting, karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai bukti kinerja pemerintah daerah tanpa mengharapkan sepenuhnya dari dana alokasi.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dibuat, memberi informasi bahwa pendapatan asli daerah merupakan indikator penting di dalam mengembangkan suatu daerah selain dukungan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (2019) dinyatakan bahwa salah satu indikator di dalam laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran (LRA) adalah pendapatan dari retribusi daerah yang maksimal sebagai kunci keberhasilan mengenai pendapatan asli daerah termasuk retribusi parkir di dalamnya melibatkan pemerintah dan masyarakat, maka pemerintah diharapkan dapat mengelola retribusi parkir secara maksimal karena telah terbukti meningkatkan pendapatan asli daerah. Berkaitan dengan pentingnya retribusi parkir di dalam meningkatkan pendapat asli daerah juga sejalan dengan Nizam (2019) yang menyatakan bahwa perlu penguatan kapasitas pemerintah di dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah termasuk mengelola retribusi parkir. Demikian juga Marlissa & Blesia (2018) bahwa pemerintah daerah harus memiliki kreativitas di dalam mengembangkan potensi daerahnya termasuk pengelolaan retribusi parkir sebagai sumber belanja daerah.

Retribusi Parkir

Berkaitan dengan pendapatan asli daerah yang di dalamnya juga termasuk retribusi parkir, telah dihasilkan beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa retribusi parkir berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dessy-Ayuni; David-Paul dan Inggriani-Elim (2014) menyimpulkan bahwa Pajak parkir mempunyai kontribusi terhadap pajak daerah. Demikian juga Butar-butar (2014) menyimpulkan bahwa retribusi parkir mempunyai pengaruh terhadap besaran pendapatan asli daerah. Tidak jauh berbeda dengan Octovido (2014) yang menyimpulkan bahwa setiap tahun retribusi parkir mengalami peningkatan.

Hasil penelitian Mosal (2013); Puspitasari (2016) juga menyimpulkan bahwa proses pemungutan pajak parkir sudah berjalan dengan baik. Terbukti bahwa perolehan hasil pajak parkir di Kota Malang dari tahun 2009 hingga tahun 2013 telah mengalami peningkatan yang diikuti dengan pertumbuhan persentase realisasi penerimaan yang berfluktuasi. Namun demikian sedikit berbeda dengan penelitian Malombeke (2016) yang dilakukan di Kota Manado dengan menyimpulkan bahwa retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado tahun anggaran 2008-2012 sangat rendah dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan yang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data dokumen sebagai sumber data dan dianalisis berdasar analisis content dalam kualitatif (Cresswell, 2013) dan Yin (2014) dengan rumusan masalah apakah penerapan Perda No. 12 Tahun 2011 Kota Gorontalo telah efektif, dan tujuan penelitian diharapkan untuk mengetahui efektivitas penerapan Perda No. 12 Tahun 2011 Kota Gorontalo.

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan oleh beberapa kajian sebelum ini menunjukkan bahwa retribusi parkir sangat menunjang tingkat kemandirian keuangan daerah. Dasar di dalam menilai efektivitas suatu retribusi daerah dapat merujuk kepada konsep Maksun (2012) dengan menggunakan formula sebagai guide lines menghitung pendapatan asli daerah dari retribusi.

Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Target Pajak Parkir}} \times 100\%$

Target Pajak Parkir

Berdasarkan formula tersebut maka kategori penilaian (Tingkat Efektivitas) terhadap suatu pencapaian dari retribusi seperti dalam tabel berikut.

Tabel 1. Tingkat Efektivitas

Tingkat Efektivitas	Presentase
Sangat Efektif	>100%
Efektif	>90-100%
Cukup Efektif	>80-90%
Kurang Efektif	>60-80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber: Maksun (2012)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dokumen yang diperoleh menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir yang efektif dapat meningkatkan PAD dari sektor ini, karena setiap tahun Berbagai uraian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir diharapkan mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan setiap tahun. Dari data dokumen dijelaskan selang tahun 2016-2018 jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat setiap tahun mengalami peningkatan. Data kendaraan disajikan dalam tabel 2.

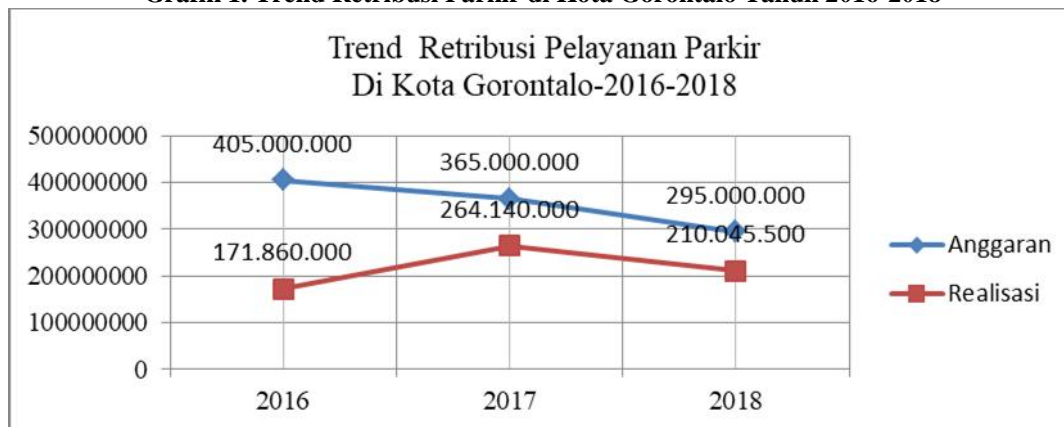
Tabel 2.
Tabel Potensi Rill Pendapatan Dari Sektor Pelayanan Parkir

Jenis	Tahun	Jumlah
Kendaraan Bermotor (Rp. 2000/Kendaraan)	2016	44.124
	2017	43.910
	2018	50.893
Mobil (Rp. 3.000/Kendaraan)	2016	13.257
	2017	13.543
	2018	16.375

Sumber Data: Samsat Kota Gorontalo (2019)

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan selama 3 tahun terakhir potensi rill pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi parkir mengalami peningkatan sejalan dengan bertambahnya jumlah kendaraan setiap tahun yang berlaku pada kendaraan roda dua dan kendaraan roda 4. Namun demikian jika dibandingkan dengan realisasi PAD dari retribusi parkir berbanding terbalik dengan potensi yang ada di Kota Gorontalo, karena nilai realisasi setiap tahun masih berfluktuasi dan cenderung tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hasil pencapaian PAD dari retribusi parkir selama 3 tahun terakhir dapat dilihat dari Grafik 1 mengenai trend retribusi parkir di Kota Gorontalo selama tahun 2016-2018.

Grafik 1. Trend Retribusi Parkir di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018



Sumber: Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Gorontalo (2019)

Berdasarkan grafik 1 menunjukkan bahwa realisasi PAD dari sektor retribusi parkir selama 3 tahun terakhir masih belum maksimal jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Selain realisasi terhadap suatu anggaran PAD dari sektor retribusi parkir juga berfluktuasi dan cenderung menurun terutama pada tahun 2018. Kondisi riil ini secara otomatis berdampak kepada kondisi APBD setiap tahun, terutama yang diperoleh dari sektor retribusi parkir.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa antara data kendaraan yang meningkat setiap tahun tidak memberi pengaruh terhadap besaran nilai retribusi parkir yang diperoleh. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya bahwa pajak parkir harus dikelola dengan efektif akan sangat memberi kontribusi terhadap pembangunan daerah. Penelitian Djasuro et.al (2019) menyimpulkan bahwa Pajak parkir mempunyai kontribusi terhadap pajak daerah. Tidak jauh berbeda dengan Butar-butar (2014) menyimpulkan bahwa retribusi parkir mempunyai pengaruh terhadap besaran pendapatan asli daerah. Sementara itu Octovido (2014) yang menyimpulkan bahwa setiap tahun retribusi parkir mengalami peningkatan karena sejalan dengan perkembangan kendaraan yang setiap tahun meningkat.

Berkaitan dengan pentingnya retribusi parkir di dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang pengelolaannya harus dimaksimalkan juga seiring dengan hasil penelitian (Cassee, 2019; Mosal, 2013; Puspitasari, 2016) yang juga menyimpulkan bahwa proses pemungutan retribusi parkir sudah berjalan dengan baik. Terbukti bahwa perolehan hasil pajak parkir di Kota Malang dari tahun 2009 hingga tahun 2013 telah mengalami peningkatan yang diikuti dengan pertumbuhan persentase realisasi penerimaan yang berfluktuasi. Namun demikian hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Malombeke (2016) yang dilakukan di Kota Manado dengan menyimpulkan bahwa retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado tahun anggaran 2008-2012 sangat rendah dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan yang lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Jika diperhatikan maksud peraturan pemerintah daerah No. 12 Tahun 2011, yang mengharuskan agar dinas yang terkait yang mengurus retribusi parkir yang hasilnya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah setiap tahun dapat meningkatkan anggaran dan realisasi pendapatan dari retribusi parkir belum efektif, sehingga berdampak terhadap realisasi pendapatan ini setiap tahun mengalami penurunan walaupun jumlah kendaraan mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir (2016-2018). Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini maka disarankan kepada pemerintah daerah kota Gorontalo melalui dinas terkait untuk mendata dan mengenakan retribusi parkir secara sah pada beberapa tempat seperti; pasar, Mall Kota Gorontalo; Pusat Pertokoan Lama; Pusat Pembelian Handphone dan Aksesoris; Pelabuhan; Pelelangan Ikan; Ruang Terbuka Hijau; dan objek parkir Lapangan Taruna

DAFTAR PUSTAKA

- Baswedan, A. (2019). Parking tax increase, Anies Baswedan: It's on the Vehicle Users.
- Beatty, K. (2018). Government receipts and expenditures. *Survey of Current Business*, 98(6), 1–6.
- Butar-butur, T. E. (2014). *Analisis peranan pajak parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah*. EMBA. Retrieved from search?q=Butarbutur%2C+T.+E.+(2014).+Analisis+peranan+pajak+parkir+terhadap+peningkatan+pendapatan+asli+daerah.+EMBA%2C+697-704.&oq=Butarbutur%2C+T.+E.+(2014).+Analisis+peranan+pajak+parkir+terhadap+peningkatan+pendapatan+asli+daerah.+EMBA%2C+697-704.&aqs=chrome..69i57.2165j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- Cassee, A. (2019). International tax competition and justice: The case for global minimum tax rates, *18*(3), 242–263. Retrieved from <https://doi.org/10.1177/1470594X19848074>
- Creswell, J. (2013). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
file:///C:/Users/Notebook/Downloads/15.04.1595_dp.pdf
- Donaldson, L. (1985). In Defence of Organization Theory, A Reply to the Critics.

- Cambridge. Cambridge University Press.
- Djasuro,S; Dede,H dan Fathul-Muin. (2019).Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dalam mendukung pembangunan. *Tirtayasa Ekonomika*, 14, (2), 310.
- Dessy, A.M.T; David-Paul.E.S dan Inggriani.E. (2014). Penerimaan retribusi pasar dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Tidore Kepulauan. <https://media.neliti.com/media/publications/2102-ID-penerimaan-retribusi-pasar-dalam-upaya-meningkatkan-pendapatan-asli-daerah-kota.pdf>.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4501>
- Gunter, U., & Smeral, E. (2016). The decline of tourism income elasticities in a global context. *Tourism Economics*, 22(3), 466–483. Retrieved from <https://doi.org/10.5367/te.2014.0431>
- Hans, A. (2003). Village government and rural development in Indonesia: the new democratic framework.
- Hasibuan, M.(2006). Manajemen dasar, pengertian, dan masalah,Edisi Revisi, Bumi Aksara:Jakarta.
- Johnson, A. . (2018). Global Governance, Tax Treaties, and Credible Commitments, *181*(1). Retrieved from doi.org/10.1177/0043820018776410
- Kluge, F. A. (2013). The Fiscal Impact of Population Aging in Germany. *Public Finance Review*, 41(1), 37–63. Retrieved from <https://doi.org/10.1177/1091142112439225>
- Lenze, D. G. (2018). Regional quarterly report: GDP, personal income, and more. *Of Current Business*, 98(10), 1–16.
- Lewis, B. D. (2019). Legislature size, local government expenditure and taxation, and public service access in Indonesia. *Studies in Comparative International Development*, 54(2), 274–298. Retrieved from <https://doi.org/10.1007/s12116-019-09278-1>
- Litman, T. (2010). Parking Pricing Implementation Guidelines: How More Efficient Pricing Can Help Solve Parking Problems, Increase Revenue, And Achieve Other Planning Objectives, Victoria Transport Policy Institute. Retrieved from www.vtpi.org/parkpricing.pdf
- Malombeke, N. (2016). Analisis potensi dan efektifitas pemungutan pajak parkir Di Kabupaten Minahasa Utara. *EMBA*, 645–655. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11767>
- Marlissa, E. R., & Blesia, J. U. (2018). Fiscal dependence in a special autonomy region: Evidence from a local government in eastern indonesia. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 7(1), 55–72. Retrieved from [doi:http://dx.doi.org/10.26458/jedep.v7i1.574](http://dx.doi.org/10.26458/jedep.v7i1.574)
- Mosal, M. M. (2013). Analisis efektifitas,kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah dan penerapan akuntansi di Kota Manado. *EMBA*, 374–382. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2699>
- Nizam, A. (2019). Parliament and poverty reduction in Bangladesh: Role of the MP. Retrieved from <https://doi.org/10.1177/0971523119835340>
- Octovido, I. (2014). Analisis efektifitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Batu. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Retrieved from <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/621>
- Olofin, O. P., Aiyegbusi, O. O., & Adebayo, A. A. (2019). Analysis of Foreign

- Direct Investment and Economic Growth in Nigeria: Application of Spatial Econometrics and Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS). *Foreign Trade Review*, 54(3), 159–176. Retrieved from <https://doi.org/10.1177/0015732519851631>
- Puspitasari, R. A. (2016). Peran pemungutan pajak parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Malang. Retrieved from <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/241>
- Robert K. Yin. (2014). Case study research design and methods (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Shi, W., Luo, M., Jin, M., Cheng, S. K., & Li, K. X. (2019). Urban–rural income disparity and inbound tourism: Spatial evidence from China. *Tourism Economics*. Retrieved from <https://doi.org/10.1177/1354816619872035>
- Stokan, E. J. (2019). An Estimate of the Local Economic Impact of State-Level Earned Income Tax Credits. *Economic Development Quarterly*, 33(3), 170–186. Retrieved from <https://doi.org/10.1177/0891242419858412>
- Swinney, J. (2019). Workplace parking tax: Scottish government defends proposals. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-47157371>
- Yeeles, A. (2015). Intergovernmental fiscal transfers and geographical disparities in local government income in the philippines. *Journal of Southeast Asian Economies*, 32(3), 390–401. Retrieved from [doi:http://dx.doi.org/10.1355/ae32-3f](http://dx.doi.org/10.1355/ae32-3f)
- Young, W., Currie, G., & Hamer, P. (2014). Exploring the Impact of the Melbourne CBD Parking Levy on Who Pays the Levy, Parking Supply and Mode Use. Retrieved from <https://www.emerald.com/insight/search?q=parking+tax>.